

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam kegiatan formal. Kegiatan pendidikan ini diperlukan untuk membentuk karakter bangsa, pendidikan juga merupakan tempat utama dimana para penerus bangsa berjuang dan bersaing untuk mendapat pengetahuan yang layak sehingga mampu bersaing di kancah global. Jadi dalam hal ini definisi pendidikan adalah proses atau perbuatan mendidik.

Pendidikan umumnya dibagi menjadi pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama/atas, dan kemudian perguruan tinggi universitas/magang. Melalui pendidikan diharapkan dapat melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Maka dari itu, demi mencapai tujuan dan harapan itu maka pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.

Terkait dengan masalah-masalah pendidikan, sektor pendidikan dituntut untuk lebih arif dan bijak dalam menghadapi tantangan global. Menurut Gudmund Hernes (Fattah, 2014:28) sedikitnya ada tujuh tantangan global yang dihadapi pendidikan, yaitu: 1) mengurangi kesenjangan dalam pemerataan pendidikan, kemiskinan, marginalisasi, dan eksklusivitas pendidikan, 2) mengukuhkan hubungan yang lebih baik antara pendidikan dan ekonomi setempat (lokal), dan

antara pendidikan dengan dunia kerja yang mengglobal, 3) mencegah berkembangnya riset dan pendidikan yang dikendalikan oleh pasar dan melebarnya kesenjangan teknologi dan ilmu pengetahuan di antara negara industri dan negara berkembang, 4) menjamin bahwa persyaratan riset negara berkembang menerima perhatian dan ditunjukkan oleh ilmuwan dan sarjananya, 5) mengurangi dampak negatif dari “ brain drain” dari negara miskin ke negara kaya, dan dari wilayah tertinggal ke wilayah maju, sebagai pasar untuk siswa yang juga mengglobal, 6) mengarahkan dampak dari prinsip-prinsip pemasaran dan perubahan dari negara terhadap pendidikan dan membantu perencanaan dan manajemen pendidikan, 7) menggunakan sistem pendidikan tidak hanya untuk memindahkan batang tubuh keilmuan secara umum, bahasa seni, gaya hidup di dunia yang semakin menjadi homogen.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia adalah kebijakan SISTEM ZONASI. Sistem Zonasi adalah penerimaan siswa baru berdasarkan kedekatan domisili/tempat tinggal siswa dengan sekolah. Sistem Zonasi ini sendiri telah diatur dalam Permendikbud no.17 tahun 2017. Selain Permendikbud no.17 tahun 2017, untuk penerapan kebijakan ini di Kota Batam juga melakukan pertimbangan dengan Perda Kota Batam Nomor 4 tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 (Sianturi, Tribun Batam, 2017).

Menurut data yang di muat oleh batamnews.co.id (Nurul Indra, Rabu 30 Mei 2018) menyebutkan bahwa pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di Batam akan segera dibuka. Dewan Pendidikan Kota Batam (Sudirman Dianto) sepakat

tetap menggunakan Sistem Zonasi. Berikut penjelasan mengenai Sistem Zonasi tersebut:

1. Zonasi wilayah

Konsep zonasi yang digunakan adalah zonasi berbasis wilayah, bukan administrasi. Artinya penerimaan calon siswa baru yang dekat dengan sekolah.

2. Prioritas siswa ekonomi lemah

Sistem zonasi wilayah tersebut 20% diprioritaskan untuk calon siswa dengan perekonomian lemah.

3. Kuota lain

Calon siswa dari luar Batam 5%, dan calon siswa berprestasi non akademik 5%.

4. Arahan untuk siswa ekonomi mampu

Calon siswa yang orangtuanya mampu, agar memilih sekolah swasta.

5. Solusi untuk sekolah dekat

Sistem zonasi dibuat agar tidak ada lagi keluhan tak bisa sekolah di dekat tempat tinggal mereka.

Dikutip dari batampos.co.id, (F Cecep Mulyana, 6 juli 2018) penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini kembali bermasalah di Batam. Permasalahan masih sama yakni daya tampung sekolah. Banyak anak-anak yang tak tertampung karena keterbatasan lokal ataupun sekolah di lingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat juga tidak bisa berbuat banyak dengan sekolah negeri sebab Penerimaan Peserta Didik Baru kali ini juga menggunakan sistem zonasi. Jika di

lingkungannya tidak ada lagi sekolah negeri yang menampung tentu tidak ada pilihan ke sekolah negeri di lingkungan lain karena terbentur aturan zonasi tadi. Dikarenakan hal inilah peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN SISWA BARU DI KOTA BATAM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Agar dapat menjadi rujukan pengembangan keilmuan dalam ilmu administrasi publik, khususnya kebijakan public.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan terkait dengan Kebijakan Sistem Zonasi.